BAB I

PENDAHULUAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

PT. Telkom bukan lagi perusahaan yang memonopoli pasar telekomunikasi Indonesia. Sejak karpet globalisasi digelar, kompetisi menjadi ajang yang harus dijalankan oleh perusahaan manapun.

Pembangunan nasional dilakukan merata di seluruh tanah air dan tidak hanya untuk suatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan komunikasi merupakan salah satu infrastruktur yang vital dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi

Pembangunan nasional merupakan proses perubahan disegala bidang untuk memperbaiki tingkat hidup yang berkeadilan sosial yang menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia. Perubahan yang cepat dalam dunia bisnis menyebabkan semua perusahaan dituntut untuk memaksimalkan semua potensi yang dimilikinya supaya mampu bersaing, apalagi saat krisis ekonomi yang melanda Indonesia, setiap perusahan dituntut untuk menunjukkan perannya dalam pemulihan perekonomian bangsa kita

Begitu juga PT. Telkom yang ikut melaksanakan pembangunan agar mampu memberikan pelayanan yang baik di bidang jasa komunikasi kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. PT. Telkom sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai tugas untuk memberikan

pelayanan bidang komunikasi, lalu lintas berita, informasi dan memberikan kelancaran dalam berkomunikasi baik itu untuk hubungan di dalam negeri maupun internasional agar dapat mempercepat hubungan masyarakat dan bisnis.

Dalam pelaksanan pembangunan negara, pemerintah memerlukan dana yang cukup memadai, dana yang digunakan berasal dari penerimaan kas negara dalam bentuk lain. Setiap tahunnya penerimaan kas negara salah satu sumber utamanya berasal dari pajak yang di pungut dari masyarakat wajib pajak. Karena pajak sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk terciptanya pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

Pajak adalah iuran atau pembayaran berupa uang yang dipungut oleh pemerintah untuk mengisi kas negara, uang ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pemerintah tidak memberikan imbalan secara langsung, tetapi melalui pembangunan sarana-sarana umum yang berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Setiap wajib pajak atau karyawan PT. Telkom wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang nantinya akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk mengukuhan sebagai karyawan kena pajak, pengukuhan karyawan kena pajak ini diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Pajak.

Bagi pengusaha badan atau PT. Telkom, kewajiban melaporkan usahanya tersebut pada Kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Adapun fungsi

dari pengukuhan kena pajak selain digunakan untuk mengetahui identitas pengusaha kena pajak yang sebenarnya, juga untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta untuk pengawasan administrasi perpajakan.

Dalam pembayaran pajak, wajib pajak karyawan PT. Telkom tidak membayarkan atau menyetorkan pajak langsung ke kas negara yang melalui Kantor Pos dan Giro atau Bank yang ditunjuk oleh Direktur Jendral Anggaran untuk menerima pembayaran pajak (Bank Persepsi), tetapi adanya penanggung pajak atau wakil yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak atau yang menjalankan dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penanggung pajak pada PT. Telkom harus dapat memberikan kelancaran dalam terlaksananya pembayaran pajak dan harus adanya pembukuan yang mengatur suatu proses pencatatan untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas lebih jauh dalam laporan kerja praktek ini dengan mengambil judul **"Prosedur Pembayaran Pajak Karyawan PT. Telkom Ke KPP Serang".**

1.2 Tujuan Kuliah Kerja Praktek

Adapun tujuan dari Kuliah Kerja Praktek ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis-jenis pajak yang dipungut dari karyawan PT. Telkom
2. Untuk mengetahui prosedur pembayaran pajak karyawan PT. Telkom ke KPP Serang

1.3 Kegunaan Kuliah Kerja Praktek

Dari hasil Kuliah Kerja Praktek tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi penulis, agar dapat mengetahui dengan lebih mendalam tentang masalah perpajakan khususnya prosedur pembayaran pajak karyawan PT. Telkom ke KPP Serang.
2. Bagi perusahaan sebagai sarana memberikan sumbangsihnya di bidang pendidikan dengan cara menerima mahasiswa melaksanakan kuliah kerja praktek pada perusahaan, sebagai bahan informasi yang berguna bagi perusahaan untuk dijadikan bahan pertimbangan atau jika mungkin melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu.
3. Bagi akademik khususnya program study SI jurusan Akuntansi Universitas Komputer Indonesia memberi wawasan tentang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Metode kerja praktek

Dalam pelaksanaan kuliah kerja praktek ditempatkan di bagian Seksi Keuangan di PT. Telkom Kancatel Serang, teknik pelaksanaannya yang penulis gunakan adalah day release, yaitu Kuliah Kerja Praktek dilakukan setiap hari kerja.

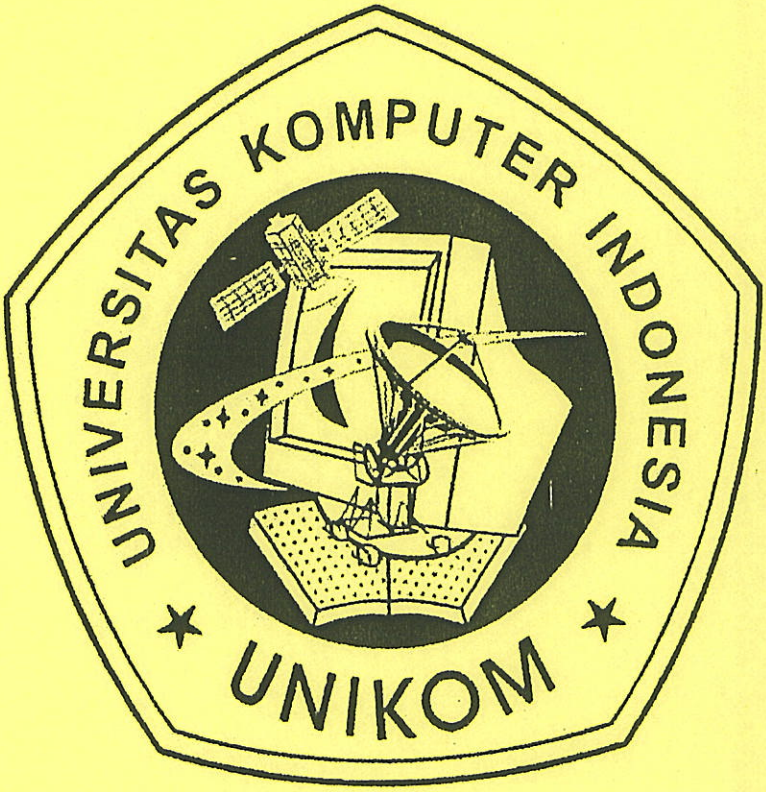
Jam kerja selama penulis melakukan kuliah kerja praktek adalah sebagai berikut :

1. Hari Senin-Kamis, pukul 08.00-17.00 WIB, istirahat pukul 12.00-13.00 WIB
2. Hari Jumat, pukul 08.00-17.00 WIB, istirahat pukul 11.30-13.00 WIB
3. Hari Sabtu dan Minggu libur

1.5 Lokasi dan Waktu Kuliah Kerja Praktek

Penulis melakukan Kuliah kerja praktek di PT. Telkom Indonesia Kancatel Serang, yang berlokasi di Jalan Raya Jakarta KM 9,5 Ciruas-Serang.

Waktu melakukan kerja praktek selama kurang lebih 30 hari atau perhitungan mulai tanggal 4 Agustus 2003 sampai dengan 4 September 2003


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM